E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://epaper.dpr.go.id

Judul : Pelaku Penyelundupan Pupuk Bersubsidi bukan ASN
Tanggal : Jumat, 04 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 8

MI_04_02_22_h.8_pelaku_penyelundupan_pupuk

Pelaku Penyelundupan Pupuk Bersubsidi bukan ASN

BUPATI Pamekasan, Jawa Timur, Baddrut Taman, menyebutkan tidak ada keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kasus penyelundupan 20,45 ton pupuk bersubsidi ke luar Madura.

Meski tersangka yang ditahan merupakan warga Pamekasan, tidak satu pun ASN yang terlibat. Baddrut menegaskan pihaknya mendukung langkah tegas petugas kepolisian mengusut dan memproses kasus tersebut karena dampaknya sangat dirasakan petani dan target produksi bahan pangan bisa tidak tercapai.

“Ini ialah kejahatan yang harus ditangani secara tegas. Saya memastikan tidak ada ASN yang terlibat,” tegasnya, kemarin.

Ia menduga kasus tersebut merupakan bisnis ilegal antaragen dan antardistributor sebab yang memiliki hak edar pupuk bersubsidi ialah agen dan distributor.

Masih terkait pupuk bersubsidi, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung yang juga Direktur Inovasi, Korporasi Akademik, dan Usaha Universitas Padjadjaran, Tualar Simarmata mengungkapkan ada dua faktor pemicu utama kelangkaan pupuk subsidi.

Pertama, rendahnya anggaran pupuk subsidi dari pemerintah jika dibandingkan dengan kebutuhan yang diusulkan petani. Contohnya pada 2020, sekitar 13,9 juta petani mengusulkan kebutuhan pupuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kebutuhan yang diusulkan mencapai 26,2 juta ton. Namun, alokasi anggaran yang ditetapkan pemerintah hanya mampu memenuhi kebutuhan sebesar 8,9 juta ton.

“Problem di pemerintah bukan hanya soal tata kelola, tetapi juga soal kemampuannya. Kebutuhan subsidi pupuk besar, tetapi kemampuan pemerintah menyediakan hanya sekitar 35%. Pasti ada kelangkaan,” kata Tualar di Bandung, Rabu, (2/2).

Faktor kedua ialah masih maraknya mafia pupuk sehingga pupuk bersubsidi susah didapat saat tiba musim tanam.

Sementara itu, Pemkab Lamongan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait tuntutan petani tambak yang mendesak agar subsidi pupuk dikembalikan.

Bupati menghubungi langsung Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu, melalui saluran telepon yang bisa didengarkan oleh perwakilan pendemo.

Dalam penjelasannya, Haeru Rahayu akan berusaha mengembalikan lagi pupuk subsidi bagi para petani ikan budi daya yang sebelumnya telah dihapus. (MG. BY/YK/YH/N-1)